



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU

Siran Pers
10 Agustus 2018
Parlemen Nasional

JSMP menghargai inisiatif Komite F Parlemen Nasional untuk menyediakan ruang kepada masyarakat sipil untuk berkontribusi terhadap proses legislatif

Pada 8 Agustus 2018 Komite F Parlemen Nasional mengadakan konsultasi publik dengan masyarakat sipil untuk mendengar tentang peran, visi, misi dan perspektif masyarakat sipil dalam kaitannya dengan peranan Komite F yang bertanggung jawab untuk masalah pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan kesetaraan gender.

Setelah menyatakan apresiasinya kepada Komite F Parlemen Nasional atas kesempatan yang diberikan kepada masyarakat sipil untuk mengambil bagian dalam proses dengar pendapat ini, JSMP mulai dengan pengantar tentang pekerjaan JSMP di bidang pemantauan pengadilan dan Parlemen Nasional, termasuk temuan dan capaian JSMP dan bagaimana ini dapat berdampak terhadap peningkatan kualitas sektor peradilan dan kepercayaan publik di sektor peradilan.

"JSMP menghargai inisiatif Komite F dan menganggap konsultasi ini sebagai langkah positif yang diambil oleh Komite F pada awal legislatif V untuk memberikan ruang serta melibatkan masyarakat sipil sehingga mereka dapat berkontribusi terhadap proses legislatif di sektor-sektor relevan di bawah tanggung jawab Komite F. Diharapkan bahwa ini tidak hanya formalitas tetapi akan terus berlangsung dan isu-isu yang disajikan oleh masyarakat sipil akan diberikan pertimbangan dan didengar," kata Direktur Eksekutif JSMP, Luis de Oliveira Sampaio.

Selama konsultasi publik ini, JSMP menerima pertanyaan dari dua anggota parlemen tentang perkembangan kasus kejahatan berat dan pendapat JSMP tentang bagaimana mengakhiri kebuntuan politik yang berkaitan dengan anggota yang diusulkan dari pemerintahan konstitusional VIII yang pencalonannya masih tertunda.

Menanggapi kedua pertanyaan ini, Direktur JSMP menyatakan bahwa masalah pencalonan anggota pemerintah adalah masalah politik dan untuk menyelesaikan masalah ini para politisi harus duduk bersama dan menemukan kesepakatan (consensus). Jika dialog dan pendekatan lain tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut, maka pilihan lain yang direkomendasikan oleh JSMP adalah untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Agung untuk diputuskan, karena hanya pengadilan yang memiliki kompetensi penuh untuk memutuskan masalah tersebut dan memiliki otoritas lebih tinggi daripada lembaga-lembaga lainnya.

Terkait dengan proses kejahatan berat, JSMP menyatakan bahwa sebagian besar pelaku utama tetap bebas dan hanya sebagian kecil saja yang dituntut. Beberapa dari mereka yang telah dituntut kemudian melarikan diri dan beberapa telah menjalani hukuman, tetapi yang diproses oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman dapat dihitung dengan jari tangan. Banyak terdakwa bebas di Indonesia dan tidak ada mekanisme untuk membawa mereka ke Timor-Leste untuk menghadapi tuntutan hukum. Secara politik, Negara tidak memprioritaskan kejahatan berat di masa lalu dan menempatkan lebih pentingnya hubungan diplomatik antara kedua negara.

Selain itu, pengadilan tidak dapat mengadili kejahatan serius karena berdasarkan Pasal 10.3 dari Regulasi UNTAET No. 11/2000, dan Pasal 22 Regulasi UNTAET No. 15/2000, tentang komposisi panel untuk kejahatan serius, panel kejahatan serius harus melibatkan dua hakim internasional dan satu hakim nasional. Saat ini tidak ada hakim internasional dan oleh karena itu pengadilan tidak dapat memproses dan mengadili kejahatan serius ini. JSMP merekomendasikan kepada anggota parlemen untuk mengamandemen undang-undang untuk memberikan kewenangan kepada hakim-hakim Timor Leste untuk memproses kasus-kasus ini di masa depan.

JSMP mencatat bahwa anggota parlemen dari Komite F dengan antusias mendengar pemikiran dan pandangan-pandangan dari masyarakat sipil. Para anggota parlemen menganggap ide-ide ini sangat penting dan mereka meminta masyarakat sipil untuk bekerja sama secara positif di masa depan untuk memantau aktivitas pemerintah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut dan meningkatkan kualitas layanan yang perlu ditingkatkan untuk membawa bangsa ini menuju kemajuan di masa depan.

Dalam sesi selama penutupan, Presiden Komite F, Maria Goru Mali Barreto, menyatakan bahwa dia menyambut baik kontribusi ini dan Komite F akan terus mendengarkan pemikiran dan kekhawatiran masyarakat sipil untuk memberikan solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh rakyat.

Sebagai penutup, JSMP meminta Komite F untuk mengundang lagi JSMP di masa depan untuk mendengar informasi rinci dari JSMP dan anggota kelompok advokasi tentang kasus-kasusu incest untuk menyampaikan dan mendiskusikan pemikiran mereka tentang kemungkinan melakukan amandemen terhadap KUHP untuk memasukkan artikel spesifik tentang kejahatan incest.

Organisasi masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam konsultasi publik dengan Komite F termasuk 12 LSM, yaitu JSMP, AIFeLa, Pradet, FGG, Orfonato Santa Bakita, Rede Feto, Fokupers, Casa Vida, Movimento Feto Foin-Sa'e, Caucus, Ba Futuru dan Aloa Foundation.

Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi:

Luis de Oliveira Sampaio
Direktur Eksekutif JSMP
Telepon: 3323883
www.jsmp.tl